

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
- John Kenedi. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2017.
- John Kenedi. *Buku Perlindungan saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Dan Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Pustaka Pelajar, 2020.
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.
- Mubarok Nafi. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Penerbit Kanzun Books, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Nur Hikmatul Auliya, dll. *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Pustaka Ilmu, 2020.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), *Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209*.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619*.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4635*.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, *Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6182*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, *Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, *Berita Negara Tahun 2022 Nomor 130*.

Disertasi, Tesis, Skripsi

Almareta Shabilla Cintya Hutami. *Proporsionalitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan)*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

Azizah Maidatul. *Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencucian Uang Robot Trading Evotrade*. PhD diss., Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, 2024.

Daniel Carlos. *Tinjauan Yuridis Penerapan Hak Restitusi pada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Nomor 32/Pid. Sus/2020/Pn. Rtg)*. PhD diss., Universitas Kristen Indonesia, 2023.

Khairunnisa Maurizka. *Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Jurnal

Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.492>

Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan teori tujuan pemidanaan dalam perkara kekerasan terhadap perempuan: Studi putusan hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 186-205. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>

Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(4), 553-559. DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559>

Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1), 53-75. Link akses: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol45/iss1/3/>

- Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 8(1), 225-247. DOI: <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v4i2.3173>
- Saputra, T., & Nugraha, Y. A. (2022). Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 66-80. DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1190>
- Sujarwo, H. (2020). Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 233-246. DOI: <https://doi.org/10.32699/syariat.v6i02.1544>
- Supriadi, A., Hartono, H., Marbun, W., & Pratiwi, S. (2024). Penjatuhan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) dan Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor. 1659/Pid. B/2019/Pn. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid. B/2020/Plg). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), 354-379. Link Akses: <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/29758>
- Syakur, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Fintech Robot Trading Melalui Perampasan Aset Pelakunya. *Majalah Hukum Nasional*, 52(2), 225-243. DOI: <https://doi.org/10.33331/mhn.v52i2.178>
- Widjaja, G. (2022). Public Understanding of Robotic Trading in the Context of Trading Law: Strengths and Weaknesses. *Webology*, 19(1), 6876-6891. Diakses dari link: https://www.academia.edu/76581704/Public_Understanding_Of_Robotic_Trading_In_The_Context_Of_Trading_Law_Strengths_And_Weaknesses
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 93-112. DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>

Sumber Lainnya

- LPSK. (2025). *Laporan Tahunan 2024 - Ringkasan Eksekutif* Diakses dari <https://www.lpsk.go.id/publikasi/cm7a2cwft002onml18rfxc239>
- LPSK. (2023). *LPSK Terima Aset Rp 21 Miliar dari Kasus Viral Blast Global*. Diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/clree5alp00occwc223735skl>
- LPSK. (2023). *Penyerahan Aset oleh Kejari Surabaya*. Diakses dari <https://www.lpsk.go.id/berita/clree5alp00occwc223735skl>
- Metro TV. (2023). *5 Kasus Penipuan Robot Trading di Indonesia Sepanjang 2022-2024*. Diakses dari: <https://www.metrotvnews.com/play/KRXCaDJO-5-kasus-penipuan-robot-trading-di-indonesia-sepanjang-2022-2023>

Putusan Pengadilan Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 44/Pid.Sus/2023/PT Sby.

Putusan Kasasi Nomor 4202 K/Pid.Sus/2023.

SINDOnews. (2022). LPSK: 4.550 Korban Investasi Bodong Ajukan Permohonan Ganti Rugi. Diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/977251/13/lpsk-4550-korban-investasi-bodong-ajukan-permohonan-ganti-rugi-1671783165>